

Pemberdayaan Perempuan Bali Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Denpasar

A.A.Ayu Prabha Duhitasatyani^{1 *}, Ni Putu Tirka Widanti^{2*}, Ida Ayu Putu Sri Widnyani³, Nyoman Diah Utari Dewi⁴, I Gusti Agung Alit Suryawati⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai.

⁵Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Udayana

E-mail: tirka.widanti@unr.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7565>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 July 2026

Revised: 25 July 2026

Accepted: 05 Aug 2026

Kata Kunci

Pemberdayaan
Perempuan, Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan
Menengah

Keywords

Women's Empowerment,
Micro, Small, and
Medium Enterprises



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan perempuan Bali dalam pengembangan UMKM di Kota Denpasar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan teori kebijakan publik, teori Gender and Development, dan teori pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan Bali dalam pengembangan UMKM didukung oleh kebijakan pemerintah daerah melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi permodalan, dan penguatan kapasitas usaha. Pemberdayaan tersebut meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pengetahuan, dan informasi, memperkuat partisipasi dalam pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan, serta meningkatkan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Kendala yang masih dihadapi meliputi keterbatasan literasi keuangan, kemampuan manajerial, pemanfaatan teknologi digital, dan akses pemasaran yang memengaruhi daya saing usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas perempuan pelaku UMKM melalui peningkatan kompetensi manajemen usaha, literasi keuangan, pemasaran digital berbasis media sosial dan marketplace, serta pengembangan jejaring usaha guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM.

This study aims to analyze the empowerment of Balinese women in the development of MSMEs in Denpasar City. A qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, documentation, and literature review. The data were analyzed descriptively using Public Policy Theory, the Gender and Development Theory, and Empowerment Theory. The findings indicate that the empowerment of Balinese women in MSME development has been supported by local government policies through training, mentoring, access to financing, and business capacity-building programs. These initiatives have enhanced women's access to economic resources, knowledge, and information, strengthened their participation in business management and decision-making, and increased their contribution to household economic welfare. However, several challenges remain, including limited financial literacy, managerial skills, digital technology utilization, and market access, which affect business competitiveness. Therefore, strengthening the capacity of women-owned MSMEs through business management training, financial literacy, digital marketing via social media and online marketplaces, and business networking is essential to improve the competitiveness and sustainability of MSMEs



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: A.A.Ayu Prabha Duhitasatyani et al (2026). Pemberdayaan Perempuan Bali Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Denpasar 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7565>

PENDAHULUAN

Ilmu Administrasi Publik mempelajari proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi dan kelembagaan yang menghubungkan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Wilson (1887), administrasi publik merupakan upaya sistematis untuk melaksanakan kebijakan secara efektif dan efisien, sedangkan Henry (2010) memandangnya sebagai studi mengenai organisasi pemerintahan dan hubungan negara dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu kajian penting dalam administrasi publik adalah kebijakan pengembangan kewirausahaan. Schumpeter (1934) menempatkan wirausaha sebagai agent of change yang menciptakan inovasi, sedangkan Drucker (1985) memandang kewirausahaan sebagai kemampuan memanfaatkan peluang melalui inovasi. Dalam perspektif administrasi publik, pengembangan wirausaha tidak hanya merupakan aktivitas ekonomi, tetapi juga instrumen kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui regulasi, pembiayaan, pelatihan, dan perluasan akses pasar. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan menjadi strategi penting dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2011).

Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pemerataan pembangunan (Tambunan, 2012). Pemerintah mendukung pengembangannya melalui akses permodalan, pelatihan, digitalisasi usaha, dan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

Di Provinsi Bali, UMKM menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah yang menopang sektor pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif, dan industri berbasis budaya lokal (Ardika & Darma Putra, 2018). Sinergi antara UMKM, pertanian, dan pariwisata menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, seperti kerajinan, kuliner khas, dan produk agroindustri yang memperkuat daya saing daerah (Porter, 1990). Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Bali, Kota Denpasar mengalami perkembangan UMKM yang pesat pada sektor kuliner, kerajinan, jasa, dan ekonomi kreatif. Selain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, UMKM juga terbukti memiliki daya lenting yang tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi.

Dalam perkembangan tersebut, perempuan memiliki kontribusi yang signifikan sebagai pelaku UMKM. Selain menjalankan peran domestik, perempuan Bali aktif mengembangkan usaha rumah tangga di bidang kuliner, kerajinan, perdagangan, dan jasa yang berkontribusi terhadap pendapatan keluarga serta pelestarian budaya lokal (Suryani, 2017; Putra & Ardana, 2019). Namun demikian, perempuan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan dan manajerial, terbatasnya pemanfaatan teknologi digital, lemahnya jaringan pemasaran, serta beban ganda antara peran domestik dan produktif (UN Women, 2020).

Pemerintah pusat maupun daerah telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM perempuan melalui pelatihan, pendampingan, fasilitasi pembiayaan, dan digitalisasi usaha. Kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menempatkan kesetaraan gender sebagai bagian penting pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2015). Pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperluas akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan berusaha (Sen, 1999). Dalam perspektif new feminism, perempuan diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kesempatan setara untuk mengembangkan kapasitas ekonomi dan sosialnya (Butler, 1990).

Secara normatif, pemberdayaan UMKM didukung oleh berbagai regulasi nasional maupun daerah. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih perlu dikaji karena belum seluruh kebutuhan pelaku UMKM perempuan dapat terakomodasi secara optimal. Dalam perspektif administrasi publik, Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil pelaku UMKM.

Pemberdayaan perempuan berkaitan erat dengan kesetaraan gender, yaitu kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, akses, kontrol, dan manfaat yang sama dalam berbagai bidang kehidupan (Riyanti, 2003). United Nations (2015) melalui Sustainable Development Goals (SDGs) menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, teknologi, serta kondisi sosial budaya. Sefryana Sari (2024) menemukan bahwa pengembangan UMKM memerlukan kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha melalui pembinaan, pendampingan, dan akses permodalan. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji perspektif gender sehingga berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada wirausaha perempuan di Kota Denpasar. Herdina Rizki Damayanti (2023) menunjukkan bahwa UMKM menjadi sarana peningkatan pendapatan sekaligus penguatan posisi sosial perempuan. Kajian ini memperkuat perspektif feminis dalam memahami pemberdayaan perempuan, meskipun dilakukan pada konteks budaya Jawa.

Dalam konteks Bali, I Wayan Ruspindi Junaedi (2019) membuktikan bahwa perkembangan pariwisata mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya sektor kerajinan, kuliner, dan jasa. Ni Made Dwi Ratnasari (2020) juga menemukan bahwa perempuan berperan penting dalam ekonomi kreatif, tetapi masih menghadapi kendala akses modal dan literasi digital. Selanjutnya, Kusuma & Deriani, N. W. (2025) menegaskan bahwa penerapan nilai Tri Hita Karana mampu meningkatkan daya saing UMKM berbasis kearifan lokal. Sementara itu, Made Sudarma (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi melalui media sosial dan e-commerce meningkatkan daya saing UMKM, meskipun adopsi teknologi masih belum merata. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam UMKM dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kapasitas pelaku usaha, teknologi, dan lingkungan sosial budaya. Namun, kajian yang mengintegrasikan implementasi kebijakan publik, pemberdayaan wirausaha perempuan, dan karakteristik ekonomi pariwisata di Kota Denpasar masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM perempuan dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan perempuan dalam pengembangan UMKM di Kota Denpasar dari perspektif administrasi publik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Yin, R. K. (2018) yang berfokus pada implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM perempuan di Kota Denpasar, Bali. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan, pengalaman pelaku UMKM perempuan, serta berbagai faktor yang memengaruhi proses pemberdayaan. Informan penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka sebagai pelaku UMKM perempuan. Sebanyak 15 informan diwawancarai secara mendalam, yang terdiri atas pelaku usaha pada sektor perdagangan, kerajinan, jasa, kuliner, dan usaha lainnya. Untuk memperkuat temuan kualitatif, penelitian ini juga didukung oleh penyebaran kuesioner terbatas kepada 40 responden pelaku UMKM perempuan sehingga diperoleh data deskriptif mengenai karakteristik usaha, pengalaman, dan persepsi terhadap program pemberdayaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta penyebaran kuesioner (Creswell, 2018). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data kuesioner digunakan sebagai pelengkap (supporting data) untuk memperkuat interpretasi hasil wawancara dan observasi. Analisis penelitian didasarkan pada tiga perspektif teoretis. Pertama, teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kedua, teori Gender and Development (GAD) digunakan untuk mengkaji sejauh mana perspektif gender diintegrasikan dalam kebijakan pemberdayaan UMKM. Ketiga, teori pemberdayaan digunakan untuk menjelaskan proses peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kemandirian ekonomi perempuan sebagai pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata yang memiliki dinamika ekonomi cukup tinggi. Luas wilayah Kota Denpasar mencapai 127,98 km² dengan jumlah penduduk sekitar ±770 ribu jiwa pada akhir tahun 2025. Komposisi penduduk perempuan relatif seimbang dengan laki-laki, yaitu sekitar 49,8% perempuan dan 50,2% laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan sumber daya pembangunan yang penting, termasuk dalam mendukung perekonomian keluarga melalui kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini melibatkan 15 informan utama yang dipilih secara purposive sampling serta didukung data dari 40 responden perempuan pelaku UMKM untuk memperkuat analisis.

Sebagian besar responden bergerak pada sektor perdagangan (50,0%), diikuti kuliner (17,5%), jasa (15,0%), kerajinan (10,0%), dan usaha lainnya (7,5%) (Tabel 1). Dominasi sektor perdagangan menunjukkan bahwa jenis usaha tersebut paling mudah dimasuki karena membutuhkan modal relatif kecil serta memiliki peluang pasar yang luas.

Tabel 1. Jenis Usaha Responden Perempuan Pelaku UMKM

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase (%)
Perdagangan	20	50,0
Kuliner	7	17,5
Jasa	6	15,0
Kerajinan	4	10,0
Lainnya	3	7,5
Jumlah	40	100,0

Mayoritas responden berada pada usia produktif 37–47 tahun (37,5%), diikuti kelompok usia 48–58 tahun (27,5%), 25–36 tahun (22,5%), dan ≥59 tahun (12,5%) (Tabel 2). Kondisi ini mendukung kemampuan perempuan dalam mengembangkan usahanya.

Tabel 2. Distribusi Umur Responden

Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
25–36 tahun	9	22,5
37–47 tahun	15	37,5
48–58 tahun	11	27,5
≥59 tahun	5	12,5
Jumlah	40	100,0

Sebagian besar responden berpendidikan SMA/SMK (52,5%), disusul SMP (27,5%), sedangkan lulusan SD dan Diploma/Sarjana masing-masing 10,0% (Tabel 3). Tingkat pendidikan tersebut menjadi modal dasar dalam pengelolaan usaha, meskipun masih memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
SD	4	10,0
SMP	11	27,5
SMA/SMK	21	52,5
Diploma/Sarjana	4	10,0
Jumlah	40	100,0

Sebagian besar responden telah menjalankan usaha selama 1–5 tahun (42,5%), sedangkan 32,5% telah berusaha selama 6–10 tahun, dan 25,0% lebih dari 10 tahun (Tabel 4). Hal ini menunjukkan adanya kombinasi pelaku usaha baru dan usaha yang telah mapan.

Tabel 4. Lama Menjalankan Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1–5 tahun	17	42,5
6–10 tahun	13	32,5
>10 tahun	10	25,0

Jumlah	40	100,0
---------------	-----------	--------------

Sebanyak 77,5% responden mengelola usaha milik sendiri, sedangkan 22,5% merupakan usaha keluarga (Tabel 5). Temuan ini menunjukkan tingginya tingkat kemandirian perempuan dalam menjalankan usaha.

Tabel 5. Status Usaha Responden

Status Usaha	Jumlah	Persentase (%)
Milik sendiri	31	77,5
Usaha keluarga	9	22,5
Jumlah	40	100,0

Sebanyak 30,0% responden pernah mengikuti pelatihan, sementara 70,0% belum pernah (Tabel 6). Kondisi ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan telah menjangkau sebagian besar pelaku UMKM, meskipun pemerataannya masih perlu ditingkatkan.

Tabel 6. Pengalaman Mengikuti Pelatihan

Pengalaman Pelatihan	Jumlah	Persentase (%)
Pernah mengikuti pelatihan	12	30,0
Belum pernah mengikuti pelatihan	28	70,0
Jumlah	40	100,0

Secara umum, perempuan pelaku UMKM di Kota Denpasar didominasi oleh usia produktif, berpendidikan menengah, mengelola usaha secara mandiri, dan bergerak pada sektor perdagangan. Karakteristik tersebut menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar meliputi aspek akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengembangan usaha, kontrol terhadap pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan, serta manfaat terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar telah membuka akses permodalan, pelatihan, pendampingan, digitalisasi usaha, dan pembiayaan melalui KUR. Namun, sebagian besar responden masih mengandalkan modal sendiri, sementara akses terhadap pelatihan dan teknologi digital belum merata. Dalam perspektif Longwe (1991), dimensi access telah berkembang, tetapi masih memerlukan pemerataan. Temuan ini juga mendukung konsep Kabeer (1999) dan Moser (1993) mengenai pentingnya akses terhadap sumber daya bagi peningkatan kapasitas ekonomi perempuan.

Partisipasi perempuan dalam pengelolaan UMKM tergolong tinggi. Perempuan berperan sebagai pelaku utama dalam produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha. Namun, keterlibatan dalam organisasi, pelatihan, dan jejaring usaha masih terbatas karena keterbatasan waktu dan beban domestik. Berdasarkan teori Longwe, dimensi participation telah berkembang pada tingkat operasional usaha, tetapi belum optimal pada tingkat kelembagaan. Perempuan memiliki kontrol yang cukup besar terhadap operasional usaha dan pengelolaan keuangan sehari-hari. Akan tetapi, keputusan strategis, seperti investasi dan pengembangan usaha, masih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga. Rendahnya pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga serta keterbatasan perencanaan bisnis menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan dan kapasitas manajerial. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi *control* menurut Longwe (1991) telah berkembang, tetapi belum sepenuhnya setara.

Pemberdayaan perempuan melalui UMKM memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan anak, serta meningkatnya kepercayaan diri perempuan. Namun, sebagian besar keuntungan masih digunakan untuk konsumsi sehingga kapasitas investasi usaha masih terbatas. Temuan ini menunjukkan tercapainya dimensi *welfare* dalam teori Longwe (1991) dan sejalan dengan konsep *achievements* (Kabeer, 1999) serta **Capability Approach** (Amartya Sen, 1999) yang menekankan peningkatan kemampuan perempuan untuk hidup lebih mandiri.

Secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan melalui UMKM di Kota Denpasar telah meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, dan

memperbesar kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal. Meskipun demikian, peningkatan akses pembiayaan, literasi keuangan, digitalisasi, dan pendampingan usaha masih diperlukan agar pemberdayaan berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan perempuan dalam pengembangan UMKM di Kota Denpasar menunjukkan bahwa a) Akses terhadap sumber daya telah didukung melalui program pemerintah berupa fasilitasi permodalan, pelatihan, pendampingan, legalitas usaha, literasi keuangan, digitalisasi, dan akses KUR. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan modal sendiri serta memiliki keterbatasan literasi keuangan dan digital. b) Partisipasi perempuan dalam pengelolaan UMKM tergolong tinggi. Perempuan berperan sebagai pelaku utama dalam produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha, meskipun keterlibatan dalam pelatihan, organisasi, dan program pemberdayaan masih terbatas akibat beban peran ganda. c) Kontrol terhadap usaha menunjukkan bahwa perempuan telah berperan dalam pengelolaan operasional dan keuangan, tetapi keputusan strategis masih banyak dilakukan bersama keluarga. Kapasitas manajemen usaha, literasi keuangan, dan perencanaan bisnis masih perlu diperkuat. d) Pemberdayaan melalui UMKM memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penguatan kemandirian ekonomi dan posisi perempuan dalam keluarga.

Saran yang dapat diberikan adalah a) Pemerintah Kota Denpasar perlu memperluas jangkauan program pemberdayaan melalui peningkatan akses pembiayaan, pelatihan, literasi keuangan dan digital, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan hingga tingkat desa/kelurahan dan banjar. b) Perempuan pelaku UMKM perlu meningkatkan kompetensi manajemen usaha, pembukuan, perencanaan bisnis, pemanfaatan teknologi digital, dan pemasaran berbasis media sosial untuk memperkuat daya saing usaha. c) Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat perlu diperkuat dalam penyediaan pembiayaan, pendampingan, pelatihan inovasi, dan transformasi digital bagi perempuan pelaku UMKM.

REFERENSI

- Ardika, I. W., & Darma Putra, I. N. (2018). *Bali dalam perspektif budaya dan pariwisata*. Pustaka Larasan.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Damayanti, H. R. (2023). Pemberdayaan perempuan dalam UMKM kriya tekstil: Studi etnografi kritis di Laweyan, Surakarta. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 19(2), 145–162.
- Drucker, P. F. (1985). *Innovation and entrepreneurship: Practice and principles*. Harper & Row.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Henry, N. (2010). *Public administration and public affairs* (11th ed.). Pearson.
- Junaedi, I. W. R. (2019). Pengaruh pariwisata terhadap pengembangan UMKM di Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 10(1), 55–67.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kusuma, T. M., & Deriani, N. W. (2025). Tri Hita Karana in the Principles of Green Economy to Enhance the Competitiveness of MSMEs. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.25078/vidyottama.v9i1.4403>
- Longwe, S. H. (1991). *Gender awareness: The missing element in the Third World development project*. Women for Change.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice, and training*. Routledge.
- Putra, I. G. B. R., & Ardana, I. K. (2019). Pemberdayaan UMKM perempuan berbasis budaya lokal di Bali. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 21(1), 45–56.
- Ratnasari, N. M. D. (2020). Peran perempuan dalam pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Bali. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 5(1), 23–37.
- Riyanti, B. P. D. (2003). *Kewirausahaan dari sudut pandang psikologi kepribadian*. Grasindo.

- Sari, S. (2024). Collaborative governance dalam pengembangan UMKM di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 1–15.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle*. Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sudarma, M. (2021). Digitalisasi UMKM dan peningkatan daya saing wirausaha di Bali. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(1), 45–58.
- Suryani, N. M. (2017). Peran perempuan Bali dalam pengembangan usaha mikro berbasis rumah tangga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 145–156.
- Tambunan, T. T. H. (2012). *Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- UN Women. (2020). *Women's entrepreneurship and inclusive growth*. United Nations.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- Wilson, W. (1887). The study of administration. *Political Science Quarterly*, 2(2).
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.